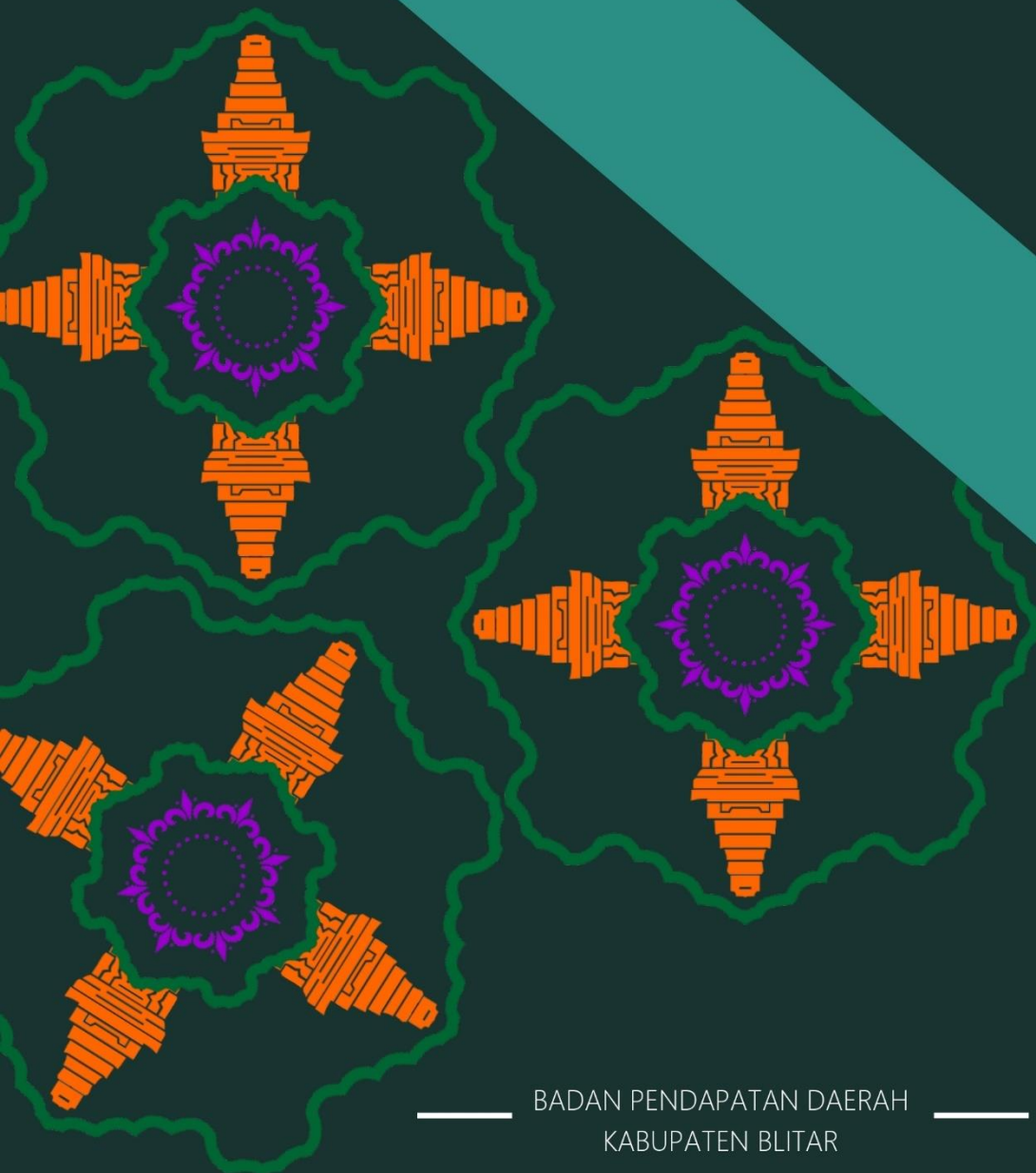


Bapenda
juara



RENJA - P 2024



BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR

KATA PENGANTAR

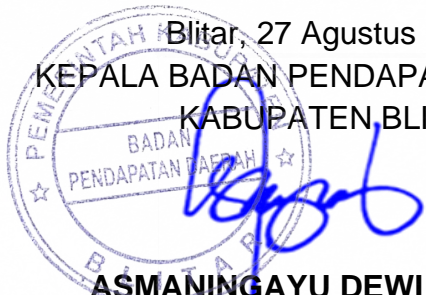
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar telah berhasil menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024.

Renja PD ini disusun untuk dijadikan pedoman dan acuan bagi setiap elemen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar sebagai pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan serta tugas pembantuan, dalam melaksanakan aktifitas, sehingga rencana penerimaan (target) yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. Dan merupakan bentuk komitmen penuh organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dalam mewujudkan visi Kabupaten Blitar, yakni “Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia, Baldatun, Toyyibatun, Warobbun Ghofur“. Dengan demikian, dokumen Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen-dokumen yang lain, seperti Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.

Usaha maksimal telah dilakukan dalam penyusunan dokumen Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 ini, namun kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut di masa mendatang. Oleh karena itu, masukan-masukan positif dan konstruktif bagi penyempurnaan dokumen ini tetap diperlukan.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan.

Blitar, 27 Agustus 2024
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR



ASMANINGAYU DEWI L., ST, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19780426 200212 2 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA S.D TW II	8
2.1. Analisa Kinerja Pelayanan Bapenda	8
2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapenda	10
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda s.d Triwulan II	11
BAB III RENCANA KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH	24
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	24
BAB V PENUTUP	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten blitar adalah Perangkat Daerah pelaksana Urusan Penunjang Keuangan Daerah Sub Urusan Pendapatan Daerah dengan spesialisasi pada bidang perpajakan serta sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayan publik yang berkaitan dengan pajak, maka diperlukan kemampuan untuk berinteraksi dan menjalin hubungan yang harmonis, baik secara vertikal, horizontal maupun hubungan dengan masyarakat. Itu semua dapat diwujudkan melalui sebuah perencanaan yang profesional dengan membangun konsep atau ide yang nantinya akan menjadi inovasi untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Serta optimalisasi penggalian potensi pajak daerah dengan mematangkan perencanaan yang dimiliki untuk meminimalisir kehilangan potensi pajak daerah pada tahun-tahun berikutnya. Secara operasional perencanaan tersebut dijabarkan dalam suatu dokumen yang menjadi pedoman dan arahan yang termuat dalam dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Sebagai penjabaran dari Renstra OPD, maka setiap OPD harus membuat Rencana Kerja tahunan yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Untuk menindaklanjuti evaluasi kinerja anggaran, maka dilakukan penyesuaian anggaran dan perlu disusun Rencana Kerja Perubahan OPD untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dari hasil evaluasi pada pertengahan tahun. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan OPD tetap berpedoman pada Review Renstra OPD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar merupakan dokumen yang dijadikan pedoman, acuan, serta arahan dalam melaksanakan program kegiatan, arah, tujuan, serta strategi kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan perubahan anggaran tahun 2024, dalam rangka menciptakan sistem dan prosedur yang ideal dalam proses pencapaian target pendapatan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pendapatan Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik –Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten blitar Tahun 2008 Nomor 10/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten blitar Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten blitar

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten blitar Nomor 61);

21. Peraturan Daerah Kabupaten blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten blitar Nomor 66);
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 18 Seri E);
23. Peraturan Bupati Blitar Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten blitar;
24. Peraturan Bupati Blitar Nomor 92 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten blitar Tahun 2024 Nomor 92/E).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten blitar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi kerangka dasar bagi Badan pendapatan Daerah guna meningkatkan kualitas perencanaan;
2. Mempermudah pelaksanaan koordinasi serta pengendalian kegiatan yang mencakup monitoring, analisis, dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan baik secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pejabat terkait tentang rencana kerja tahunan sehingga mempermudah dalam menentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya;
4. Memberikan arah dan pedoman bagi pelaksana kegiatan yang ada di Bapenda dalam menentukan prioritas-prioritas kegiatan

yang akan dilaksanakan, sehingga tujuan, program, dan sasaran kegiatan dapat tercapai sesuai dengan perencanaan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Membuat dan menjadikan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah lebih berkualitas;
2. Sebagai dasar bagi seluruh pelaksana kegiatan yang ada pada Bapenda dalam Menyusun dan merealisasikan kegiatan dalam mendukung pencapaian target pajak daerah dapat lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
3. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dengan prioritas-prioritas yang sudah dapat ditentukan dalam perencanaan.
4. Belanja daerah yang lebih efektif dan efisien untuk tercapainya target pajak daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Dinas Pendapatan Tahun 2024 diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Analisa Kinerja Pelayanan Bapenda Kabupaten blitar

Evaluasi pada pelaksanaan kegiatan diperlukan guna memperbaiki hal-hal yang menyebabkan pencapaian target kinerja belum optimal. Evaluasi juga berguna sebagai pedoman untuk penentuan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berikutnya. Evaluasi hasil pengendalian pelaksanaan Renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja. Evaluasi hasil renja OPD tahun 2024 berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dalam dokumen Renja tahun 2024 yang sudah ditetapkan dalam APBD Tahun 2024. Jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program dan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja tahun 2024, sedangkan jumlah Anggaran (Rupiah) untuk setiap program sesuai dengan APBD Kabupaten blitar tahun 2024. Adapun beberapa pencapaian kinerja program kegiatan yang dilaksanakan pada awal tahun 2024 sampai dengan tribulan II adalah sebagai berikut:

Hasil Evaluasi pelaksanaan program kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten blitar triwulan II Tahun 2024 adalah digambarkan dengan matriks sebagai berikut :

Tabel T-2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Blitar

No.	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024 s/d 31 Juli	
1.	Indeks Kepuasan Aparatur	N/A	---	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
2.	pendapatan asli daerah	N/A	penerimaan pajak daerah	114.743.250.000,0 0,- LRA	130.802.445.232,0 0,- Renstra	135.018.539.101,50, - Real	175.494.370.707,0 0	123.608.401.410,9 2 LRA	128.624.500.722,7 6 Renstra	63.472.720.614,68	
			penerimaan pendapatan asli daerah	354.718.788.878,0 9,-	383.365.510.540,0 0,-	379.309.319.378,36, -		422.738.491.399,6 8	411.640.283.372,4 6	209.817.035.595,6 3	

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapenda

Tingkat kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah adalah meningkatkan profesionalisme petugas juga kualitas sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan maksimal sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten blitar menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada yaitu :

- a. Sistem Pelayanan dan Pembayaran Online yang masih belum maksimal.
- b. Potensi pajak daerah yang masih belum tergali secara maksimal.
- c. Kesadaran dan Kepatuhan masyarakat utamanya wajib pajak dalam membayar pajak
- d. Komunikasi dan Koordinasi yang belum maksimal dengan beberapa OPD penghasil.
- e. Belum Optimalnya penagihan piutang terutama PBB-P2 yaitu ditandai dengan semakin bertambahnya nilai Piutang Pajak Daerah.

Dengan adanya beberapa permasalahan dan hambatan tersebut tentunya akan sangat berdampak terhadap pencapaian visi dan Bupati. Maka dari itu permasalahan dan hambatan tersebut harus segera ditindaklanjuti agar visi dan misi dari Bupati dapat berjalan sesuai dengan harapan. Oleh karenanya Badan Pendapatan Daerah harus melihat Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Layanan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten blitar. Adapun Tantangan yang ada dalam Badan Pendapatan Daerah Kabupaten blitar adalah :

- a. Sistem aplikasi dan jaringan yang terkadang masih ada kendala, merupakan salah satu tantangan yang harus segera di tindak lanjuti.
- b. Beberapa potensi daerah yang sebenarnya sudah dapat terpetakan, hanya kesulitannya muncul dari wajib pajak itu sendiri.
- c. Piutang yang semakin meningkat jikat tidak ditindaklanjuti.

Lalu Peluang (Opportunity) adalah situasi eksternal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten blitar yang berpotensi menguntungkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten blitar dan perangkat daerah lain yang bergerak dalam bidang yang sama. Peluang dimaksud terdiri dari :

- a. Jumlah Penduduk yang cukup banyak merupakan peluang pasar bagi setiap usaha yang menjadi objek pajak.
- b. Letak wilayah yang luas, sehingga masih banyak potensi pajak yang masih dapat digali lebih maksimal lagi.

- c. Kabupaten blitar mempunyai sumber alam, produksi hasil bumi yang melimpah, hasil peternakan, perikanan, hasil tambang, serta pariwisata sejarah yang mempunyai nilai, dan jika di maksimalkan akan menghasilkan PAD yang sangat luar biasa.
- d. Perkembangan Teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- e. Adanya Kerjasama yang baik dengan instansi yang terkait baik vertikal maupun horizontal.

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik local, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan Badan Pendapatan Daerah kabupaten blitar, maka dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun kedepan. Sehingga menuntut terjadinya peningkatan layanan pada Badan Pendapatan Daerah dalam oerientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan mendukung pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi, dan program pemerintah Kabupaten blitar 2021 – 2026.

Bertolak pada identifikasi permasalahan, visi, misi, serta arah kebijakan kepala daerah, hasil Analisa Renstra, maka beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten blitar adalah :

- a. Optimalisasi pemanfaatan teknologi transformasi
- b. Optimalisasi kualitas database potensi pajak daerah
- c. Optimalisasi pelayanan pajak daerah
- d. Optimalisasi Kolaborasi antar instansi terkait
- e. Optimalisasi Penagihan piutang pajak daerah.

2.3. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Pelayanan Publik baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh kepada kesadaran dan kepatuhan masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah terutama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar perlu memberikan pelayanan publik yang baik dan profesional serta berkualitas.

Untuk mengetahui capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah maka perlu dikaji capaian kinerja dan realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

TABEL REALISASI KEUANGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	6.859.831.148,00	3.160.741.254,00	46,08
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	10.794.635.154,00	1.375.834.458,00	12,75
TOTAL		17.654.466.302,00	4.536.575.712,00	25,70

Capaian Realisasi Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II sebesar 25,70% atau sebesar Rp 4.536.575.712,00 dari total Pagu anggaran sebesar Rp 17.654.466.302,00. Jika dilihat dari capaian belanja, masih jauh dari target, hanya memang secara mapping belanja banyak kegiatan-kegiatan yang dianggarkan pada triwulan III dan IV.

Berikut Capaian Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

1. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target Kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan:
 - a. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - a) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Sub Kegiatan ini belum mencapai target, terealisasi sebanyak 1 Jenis dari target 2 Jenis.
 - b) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
Sub Kegiatan ini belum mencapai target, terealisasi sebanyak 1 Objek Pajak dari target 2 Objek Pajak.
 - c) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Sub Kegiatan ini belum mencapai target, terealisasi sebanyak 2 Jenis dari target 10 Jenis Data Pajak yang dilakukan pengolahan dan pemeliharaan.
 - d) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Sub Kegiatan ini belum mencapai target, terealisasi sebanyak 1 Objek Pajak dari target 5 Objek Pajak yang dilakukan penilaian.
 - e) Pengendalian, Pemeriksaan, Pengawasan Pajak Daerah

Sub Kegiatan ini terealisasi sebanyak 20 rekomendasi dengan target sebanyak 100 rekomendasi yang dikeluarkan sehingga masih tercapai 20% belum sesuai target seharusnya. Hal ini dikarenakan pemeriksaan dan pengawasan yang masih dalam proses.

f) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

Sub Kegiatan ini terealisasi sebanyak 1 kali dengan target sebanyak 4 kali yang dikeluarkan sehingga masih tercapai 25% belum sesuai target seharusnya.

b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan ini terealisasi sebanyak 39 Orang dari target sebanyak 44 Orang ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan. Hal ini dikarenakan terdapat ASN yang mutasi maupun pensiun.

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sub Kegiatan ini terealisasi sebanyak 39 dokumen dari target sebanyak 44 dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas. Hal ini dikarenakan terdapat ASN yang mutasi maupun pensiun.

2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub Kegiatan ini terealisasi sebanyak 1 Jenis dari target sebanyak 5 Jenis sehingga masih tercapai 20% belum sesuai target seharusnya. Hal ini dikarenakan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor masih dalam operasional yang berjalan dengan baik.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan ini terealisasi sebanyak 3 Jenis dari target sebanyak 12 Jenis peralatan dan perlengkapan kantor sehingga masih tercapai 25% belum sesuai target seharusnya.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub Kegiatan ini terealisasi sebanyak 2 Jenis dari target sebanyak 10 Jenis peralatan rumah tangga sehingga masih tercapai 20% belum sesuai target seharusnya.

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan ini terealisasi sebanyak 3 Jenis dari target sebanyak 10 Jenis bahan logistik kantor sehingga masih tercapai 33% belum sesuai target seharusnya.

- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sub Kegiatan ini terealisasi sebanyak 1 Jenis dari target sebanyak 5 Jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan sehingga masih tercapai 20% belum sesuai target seharusnya.
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sub Kegiatan ini terealisasi sebanyak 1 Jenis dari target sebanyak 4 Jenis eksemplar bahan bacaan yang disediakan sehingga masih tercapai 25% belum sesuai target seharusnya.
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sub Kegiatan ini terealisasi sebanyak 2 kali dari target sebanyak 8 kali koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan sehingga masih tercapai sebesar 25% belum sesuai target seharusnya. Hal ini dikarenakan pada periode tersebut belum cukup sering mengundang wajib pajak untuk pemeriksaan maupun klarifikasi.
- 3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sub Kegiatan ini belum ada yang terealisasi dari target sebanyak 2 Unit peralatan rumah tangga yang disediakan.
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sub Kegiatan ini terealisasi sebanyak 7 Jenis dari target sebanyak 12 laporan surat menyurat masih tercapai 25% belum sesuai target seharusnya.
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sub Kegiatan ini terealisasi sebanyak 4 Jenis dari target sebanyak 12 rekening yang dibayarkan masih tercapai 30% belum sesuai target seharusnya.
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sub Kegiatan ini terealisasi sebanyak 4 Laporan dari target sebanyak 12 Laporan masih tercapai 30% belum sesuai target seharusnya.
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sub Kegiatan ini terealisasi sebanyak 3 unit dari target sebanyak 12 unit kendaraan dinas yang dipelihara masih tercapai 30% belum sesuai target seharusnya.
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan ini terealisasi sebanyak 1 unit dari target sebanyak 5 unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara masih tercapai 30% belum sesuai target seharusnya.

- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sub Kegiatan ini belum ada yang terealisasi dari target sebanyak 1 gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi.

2. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target Kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan:

a. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- a) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 1 dokumen dari target sebanyak 1 dokumen.

- b) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 22 kecamatan dari target sebanyak 22 kecamatan.

- c) Penetapan Wajib Pajak Daerah

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 795.711 Wajib Pajak dari target sebanyak 795.711 Wajib Pajak dengan jumlah surat ketetapan pajak daerah.

- d) Penagihan Pajak Daerah

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 795.711WP dari target sebanyak 795.711 Wajib Pajak yang tertagih.

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

Dari mulai Triwulan I sampai dengan Triwulan II belum ada program/kegiatan yang melebihi target, dikarenakan di Badan Pendapatan Daerah perihal kegiatan, banyak dimulai dari pertengahan Tahun di banding Triwulan I dan II.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan yaitu :

a. Faktor Tidak Tercapai target kinerja program kegiatan :

- Ada beberapa program/kegiatan yang memang baru direncanakan pada Triwulan III dan IV
- Mundurnya kegiatan yang sudah direncanakan karena beberapa faktor.

b. Faktor Terpenuhinya target kinerja program/kegiatan :

- Perencanaan dan pelaksanaan yang berjalan sesuai rencana
 - Kerjasama dengan semua pihak yang terkait berjalan sesuai harapan
- c. Faktor Melebihinya target kinerja/program/kegiatan :

5. Implikasi yang timbul terhadap Capaian Program Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, ialah terwujudnya Kabupaten Blitar sebagai daerah yang mandiri dan sejahtera yang dimaksudkan adalah mandiri secara fiskal.
6. Kebijakan/tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan program/kegiatan tersebut dengan melakukan perubahan anggaran (PAPBD) jika terjadi kesalahan usulan program/kegiatan, atau dengan pergeseran anggaran kegiatan yang masih sesuai dengan program serta perlu dilakukan revisi terhadap indikator kinerja yang terdapat dalam renstra

TABEL REALISASI PAJAK DAERAH SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2024

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	PAJAK HOTEL	190.545.278,00	85.423.142,00	44,83
2	PAJAK RESTO	4.794.746.293,00	1.860.592.733,13	38,80
3	PAJAK HIBURAN	2.007.049.808,00	987.457.903,00	49,20
4	PAJAK REKLAME	679.200.000,00	225.022.714,00	33,13
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	51.042.826.800,00	27.105.774.580,00	53,10
6	PAJAK PARKIR	197.573.670,00	95.273.808,00	48,22
7	PAJAK AIR TANAH	231.432.800,00	211.304.419,00	91,30
8	PAJAK MBLB	623.773.528,00	216.237.753,00	34,67
9	PBB	46.317.798.087,00	11.501.135.381,00	24,83
10	BPHTB	28.933.592.839,00	7.495.752.185,00	25,91
	PAJAK DAERAH	135.018.539.103,00	49.783.974.621,31	36,87

Capaian penerimaan Pajak Daerah pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 36,87% dimana indikator pengukuran berasal dari perhitungan target sebesar Rp 135.018.539.103,00 sedangkan realisasi target yang telah ditetapkan pada tahun tersebut sebesar Rp 49.783.974.621,31. Dilihat dari capaian tersebut, target penerimaan pajak daerah masih belum dapat tercapai dikarenakan ada beberapa kendala dan hambatan yang masih dalam proses penyelesaian. Dikatakan tercapai target jika penerimaan pajak daerah sudah mencapai 40%, dan berikut Realisasi dan Capaian Pajak yang masih belum 40% yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Restoran, ada beberapa kendala dalam penerimaan pajak restoran yang masih belum optimal yaitu :
 - a. Pengusaha restoran baru yang tidak melaporkan usaha yang dikelola kepada Bapenda.

- b. Pengusaha restoran yang omsetnya sudah terpenuhi untuk menjadi wajib pajak, tidak mau membayar sesuai ketentuan yang seharusnya bahkan ada beberapa yang tidak mau membayar
 - c. Kesadaran wajib pajak yang masih rendah
 - d. Sanksi yang belum tegas
2. Pajak Reklame, ada beberapa kendala juga dalam penerimaan pajak reklame yang belum optimal yaitu :
 - a. Reklame insidental yang menjamur, tanpa tahu siapa yang memiliki
 - b. Persyaratan reklame yang ukurannya lebih dari 15 meter, pengajuan persyaratan PBG yang kurang mudah
 - c. Sanksi yang belum tegas
 - d. Penertiban reklame yang masih belum optimal
 - e. Kesadaran masyarakat, utamanya wajib pajak yang masih rendah.
 3. Pajak MBLB, beberapa kendala dalam penerimaan pajak MBLB yaitu:
 - a. Belum optimalnya pengawasan terhadap pajak MBLB
 - b. Rumitnya proses perizinan pertambangan
 - c. Kurangnya kesadaran masyarakat (pengusaha MBLB)
 - d. Sanksi yang belum tegas
 4. PBB P-2, ada beberapa kendala dalam penerimaan PBB P-2 yaitu :
 - a. Distribusi SPPT yang baru terlaksana pada bulan februari akhir, sehingga pada triwulan I memang penerimaan PBB masih rendah.
 - b. Kesadaran masyarakat (wajib pajak) yang masih rendah.
 - c. Sanksi yang belum tegas.
 - d. Database pajak yang masih perlu dioptimalkan
 5. BPHTB, beberapa kendala kenapa penerimaan BPHTB masih rendah yaitu :
 - a. Banyak Wajib Pajak yang melaporkan BPHTB dengan harga yang masih belum sesuai dengan kenyataannya, sehingga dibutuhkan untuk Cek lapangan. Padahal secara jumlah transaksi yang masuk sudah banyak.

Dilihat dari penjelasan diatas, maka diperlukan Langkah-langkah strategis untuk memecahkan permasalahan penerimaan pajak pada beberapa jenis pajak diatas. Berikut strategi untuk mengoptimalkan pajak pada beberapa jenis Pajak Daerah yang masih belum Optimal, yaitu sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan Edukasi kepada masyarakat utamanya wajib pajak.
2. Monitoring dan Evaluasi setiap Kecamatan, Desa/Kelurahan pada beberapa jenis pajak yang berkaitan seperti PBB.
3. Terus melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak yang masih belum sesuai dalam memberikan laporan perpajakannya.
4. Memperbaiki Database Pajak agar lebih akurat

5. Rekonsiliasi Pajak secara rutin
6. Optimalisasi sistem informasi baik dari sisi pelayanan maupun pembayaran pajak daerah
7. Berkolaborasi dengan stakeholder terkait, guna mencapai tujuan peningkatan penerimaan Pajak Daerah.

Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Blitar Periode Pelaksanaan 2024 Triwulan I dan II disajikan dalam table berikut :

Tabel 2.3
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Blitar
Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar
Periode Pelaksanaan 2024 Triwulan I dan II

Nama PD : Badan Pendapatan Daerah
Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar yang mengacu pada sasaran RKPD

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV											
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6+12		15=(14/5)*100% Rp=14			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp			
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100	6.875.033.279,00	100	39.401.195.413,00	100	6.859.831.148,00	25	1.048.362.679,00	25	2.112.378.575,00		0,00		0,00	25	3.160.741.254,00	62,5	46,08	62,5	42.561.936.667,00	62,5	62,50	619,08	Badan Pendapatan Daerah
2	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100	5.740.592.449,00	100	10.853.903.958,00	100	5.295.422.302,00	25	1.010.164.652,00	50	1.777.146.369,00		0,00		0,00	50	2.787.311.021,00	50	52,64	50	13.641.214.979,00	50	237,63	13.641.214.979,00	Badan Pendapatan Daerah
3	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39	5.367.421.449,00	44	10.186.692.184,00	44	4.774.102.302,00	44	1.010.164.652,00	44	1.702.907.829,00		0,00		0,00	44	2.713.072.481,00	112,82	56,83	44	12.899.764.665,00	112,82	240,33	12.899.764.665,00	Badan Pendapatan Daerah
4	5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39	373.171.000,00	44	667.211.774,00	44	521.320.000,00	44	0,00	44	74.238.540,00		0,00		0,00	44	74.238.540,00	112,82	14,24	44	741.450.314,00	112,82	198,69	741.450.314,00	Badan Pendapatan Daerah
5	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	12	466.696.300,00	12	915.793.090,00	12	513.345.797,00	3	0,00	6	139.673.410,00		0,00		0,00	6	139.673.410,00	50	27,21	6	1.055.466.500,00	50	226,16	1.055.466.500,00	Badan Pendapatan Daerah

6	5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	11.195.000,00	4	23.673.000,00	5	11.200.000,00	0	0,00	1	2.801.000,00	0,00	0,00	1	2.801.000,00	100	25,01	5	26.474.000,00	100	236,48	26.474.000,00	Badan Pendapatan Daerah
7	5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	207.140.900,00	8,5	349.294.090,00	12	193.756.990,00	0	0,00	3	65.636.610,00	0,00	0,00	3	65.636.610,00		33,88		414.930.700,00		200,31	414.930.700,00	Badan Pendapatan Daerah
8	5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	15.305.400,00	10,5	30.302.900,00	10	15.770.785,00	0	0,00	2	3.900.000,00	0,00	0,00	2	3.900.000,00	62,5	24,73	6,25	34.202.900,00	62,5	223,47	34.202.900,00	Badan Pendapatan Daerah
9	5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	16.280.000,00	1	37.280.000,00	10	25.000.000,00	0	0,00	2,5	7.200.000,00	0,00	0,00	2,5	7.200.000,00	17,5	28,80	1,75	44.480.000,00	17,5	273,22	44.480.000,00	Badan Pendapatan Daerah
10	5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25	119.920.000,00	7,5	225.796.100,00	5	100.000.000,00	0	0,00	1	12.520.800,00	0,00	0,00	1	12.520.800,00		12,52		238.316.900,00		198,73	238.316.900,00	Badan Pendapatan Daerah
11	5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	20	7.230.000,00	2	12.900.000,00	4	5.000.000,00	0	0,00	1	1.640.000,00	0,00	0,00	1	1.640.000,00	7,5	32,80	1,5	14.540.000,00	7,5	201,11	14.540.000,00	Badan Pendapatan Daerah
12	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	89.625.000,00	12	236.547.000,00	8	162.618.022,00	0	0,00	2	45.975.000,00	0,00	0,00	2	45.975.000,00	35	28,27	14	282.522.000,00	35	315,23	282.522.000,00	Badan Pendapatan Daerah
13	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100	64.820.000,00	100	213.478.000,00	100	219.263.628,00	2,5	0,00	50	0,00	0,00	0,00	50	0,00	50	0,00	50	213.478.000,00	50	329,34	213.478.000,00	Badan Pendapatan Daerah
14	5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	64.820.000,00	5,5	213.478.000,00	2	219.263.628,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00		213.478.000,00		329,34	213.478.000,00	Badan Pendapatan Daerah
15	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Tepat Waktu	100	363.570.530,00	100	26.813.242,826,00	100	489.009.421,00	2,5	38.198.027,00	50	144.187,438,00	0,00	0,00	50	182.385,465,00	50	37,30	50	26.995.628,291,00	50	7.425,14	26.995.628,291,00	Badan Pendapatan Daerah
16	5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	16.670.000,00	12	20.670.000,00	12	3.833.000,00	0	0,00	7	2.000.000,00	0,00	0,00	7	2.000.000,00		52,18		22.670.000,00		135,99	22.670.000,00	Badan Pendapatan Daerah

17	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	126.054.570,00	7,5	26.324.473.183,00	12	125.000.000,00	2	27.707.348,00	2	23.649.600,00	0,00	0,00	4	51.356.948,00	41,09	26.375.830.131,00	20.924,14	26.375.830.131,00	Badan Pendapatan Daerah
18	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	220.845.960,00	6	468.099.643,00	12	360.176.421,00	1	10.490.679,00	3	118.537.838,00	0,00	0,00	4	129.028.517,00	35,82	597.128.160,00	270,38	597.128.160,00	Badan Pendapatan Daerah
19	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	100	239.354.000,00	100	604.777.539,00	100	342.790.000,00	25	0,00	50	51.371.358,00	0,00	0,00	50	51.371.358,00	14,99	656.148.897,00	274,13	656.148.897,00	Badan Pendapatan Daerah
20	5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	100.800.000,00	7,5	217.799.599,00	12	180.000.000,00	0	0,00	3	32.772.908,00	0,00	0,00	3	32.772.908,00	18,21	250.572.507,00	248,58	250.572.507,00	Badan Pendapatan Daerah
21	5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	42.554.000,00	3	91.541.900,00	5	62.790.000,00	0	0,00	1	18.598.450,00	0,00	0,00	1	18.598.450,00	29,62	110.140.350,00	258,82	110.140.350,00	Badan Pendapatan Daerah
22	5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	96.000.000,00	0,5	295.436.040,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.436.040,00	307,75	295.436.040,00	Badan Pendapatan Daerah
23	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah		11.128.514.521,00		20.288.760.221,00		10.445.135.154,00		280.106.900,00		969.547.558,00	0,00	0,00		1.249.654.458,00	11,96	21.538.414.679,00		193,54	Badan Pendapatan Daerah
24	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Presentase Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		11.128.514.521,00		20.288.760.221,00		10.445.135.154,00		280.106.900,00		969.547.558,00	0,00	0,00		1.249.654.458,00	11,96	21.538.414.679,00	193,54	21.538.414.679,00	Badan Pendapatan Daerah
25	5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	643.840.000,00	1	1.333.877.710,00	2	453.000.000,00	0	0,00	1	30.467.250,00	0,00	0,00	1	30.467.250,00	6,73	1.364.344.960,00	211,91	1.364.344.960,00	Badan Pendapatan Daerah
26	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	22	1.048.476.600,00	22	2.251.809.760,00	22	986.207.284,00	2	21.381.900,00	4	79.077.500,00	0,00	0,00	6	100.459.400,00	10,19	2.352.269.160,00	224,35	2.352.269.160,00	Badan Pendapatan Daerah
27	5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2	425.373.000,00	5	1.758.114.540,00	2	935.500.000,00	1	258.725.000,00	0	0,00	0,00	0,00	1	258.725.000,00	27,66	2.016.839.540,00	474,13	2.016.839.540,00	Badan Pendapatan Daerah

28	5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2	1.017.950.000,00	4	2.022.150.000,00	2	1.612.024.787,00	0	0,00	1	138.149.058,00	0,00	0,00	1	138.149.058,00	8,57	2.160.299.058,00	212,22	2.160.299.058,00	Badan Pendapatan Daerah			
29	5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	10	797.192.956,00	17	1.612.654.896,00	10	576.710.568,00	0	0,00	2	125.239.100,00	0,00	0,00	2	125.239.100,00	21,72	1.737.893.996,00	218,00	1.737.893.996,00	Badan Pendapatan Daerah			
30	5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	25	1.250.000.000,00	7	54.170.100,00	5	569.440.000,00	0	0,00	1	16.000.000,00	0,00	0,00	1	16.000.000,00	2,81	70.170.100,00	5,61	70.170.100,00	Badan Pendapatan Daerah			
31	5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	795,711	998.647.451,00	795,711	1.944.018.351,00	795,711	165.235.000,00	0	0,00	796	44.912.000,00	0,00	0,00	795,711	44.912.000,00	100	27,18	795,71	1.988.930.351,00	100	199,16	1.988.930.351,00	Badan Pendapatan Daerah
32	5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	795,711	4.137.350.000,00	790,62	7.874.664.350,00	795,711	4.623.120.201,00	0	0,00	796	460.948.650,00	0,00	0,00	795,711	460.948.650,00	99,68	9,97	793,17	8.335.613.000,00	99,68	201,47	8.335.613.000,00	Badan Pendapatan Daerah
33	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100	302.517.514,00	60	392.782.514,00	100	314.185.514,00	0	0,00	20	63.204.000,00	0,00	0,00	20	63.204.000,00	20,12	455.986.514,00	150,73	455.986.514,00	Badan Pendapatan Daerah			
34	5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4	507.167.000,00	6	1.044.518.000,00	4	209.711.800,00	0	0,00	1	11.550.000,00	0,00	0,00	1	11.550.000,00	5,51	1.056.068.000,00	208,23	1.056.068.000,00	Badan Pendapatan Daerah			
Rata-rata Capaian Kinerja Program																				31,25%	406,31%				
Predikat Kinerja Program																				Sangat Rendah	Sangat Tinggi				
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																				24,92%	1.025,71%				
Predikat Kinerja Kegiatan																				Sangat Rendah	Sangat Tinggi				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																									
Faktor Penghambat pencapaian Kinerja :																									
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																									
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPД berikutnya :																									

BAB III
RENCANA KERJA DAN KERANGKA
PENDANAAN PERUBAHAN TAHUN 2024
BAPENDA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar mengelola anggaran yang tertuang dalam Renja Perubahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 17.654.466.302,00 melalui dua program, delapan kegiatan dan tiga puluh empat sub kegiatan seperti yang terdapat pada table 3.1. Terkait dukungan terhadap penganggaran responsive gender, dipilih sub kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.

Tabel 3.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Keluaran
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja pada Program
5.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perangkat Daerah
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang akuntable
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntable
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan Rumah Tangga yang disediakan
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket logistik kantor yang dsediakan
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan

5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan
5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/Material yang disediakan
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
5.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang tepat Sasaran
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan
5.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah yang disediakan tepat waktu
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Peneyedian jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan
5.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah dalam Kondisi baik
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan Bayarkan pajak dan perizinannya
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan Mesin lainnya yang dipelihara
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi
5.02.01.2.05	Kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Pelayanan Adminitrasi Kepegawaian
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implemnetasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan pajak Daerah
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan Pajak daerah
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis pajak Daerah serta Pengembangan pajak daerah dan kebijakan Daerah

5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Daerah, Subyek Pajak dan Wajib pajak daerah
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan Hasil Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan basis data Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanahdan Bangunan (BPHTB)	Jumlah obyek Pajak yang disesuaikan NJOPNya
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penilaian dan verifikasi
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Hasil pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan pajak Daerah
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan pajak Daerah
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Retribusi daerah

Dari uraian diatas, dapat dilihat pada rincian tabel matriks Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perubahan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten blitar

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Keuangan				17.654.466.302,00				23.703.531.321,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja pada Program		85%	6.859.838.179,00			85%	8.268.630.246,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan	Bapenda	-	-	APBD KAB		95	100.000.000,00
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perangkat Daerah	Bapenda	2 dokumen	-	APBD KAB		2 dokumen	50.000.000,00
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bapenda	2 dokumen	-	APBD KAB		2 dokumen	50.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang akuntable	Bapenda	-	5.270.853.302,00	APBD KAB		100%	6.102.167.321,00
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	44 orang	4.774.102.302,00	APBD KAB		5.523.167.321,00	8.422.697.573,00
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bapenda	44 orang	496.751.000,00	APBD KAB		579.000.000,00	232.635.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntable	Bapenda	-	534.908.517,00	APBD KAB		90%	577.453.504,00
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Bapenda	5 paket	16.189.905,00	APBD KAB		5 jenis	17.000.000,00
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Bapenda	12 paket	204.543.046,00	APBD KAB		12 jenis	205.453.504,00

	3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Bapenda	2 paket	15.770.785,00	APBD KAB		2 jenis	20.000.000,00
	4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket logistik kantor yang dsediakan	Bapenda	2 paket	25.000.000,00	APBD KAB		2 jenis	50.000.000,00
	5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Bapenda	5 paket	105.786.759,00	APBD KAB		5 jenis	100.000.000,00
	6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Umlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Bapenda	4 dokumen	5.000.000,00	APBD KAB		4 eks	10.000.000,00
	7.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/Meterial yang disediakan	Bapenda	-	-	APBD KAB		2 jenis	-
	8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bapenda	8 laporan	162.618.022,00	APBD KAB		8 kali	175.000.000,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang tepat Sasaran	Bapenda		246.066.320,00	APBD KAB		100%	350.000.000,00
	1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Bapenda	2 unit	246.066.320,00	APBD KAB		2 unit	350.000.000,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa Penuunjang Urusan pemerintahan daerah yang disediakan tepat waktu	Bapenda		450.729.940,00	APBD KAB		100%	564.009.421,00
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bapenda	12 laporan	3.833.000,00	APBD KAB		12 laporan	3.833.000,00
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Bapenda	12 laporan	125.000.000,00	APBD KAB		12 laporan	125.000.000,00
	3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Peneyedian jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	Bapenda	12 laporan	321.896.940,00	APBD KAB		12 laporan	435.176.421,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah dalam Kondisi baik	Bapenda	100 %	357.280.100,00	APBD KAB		100%	575.000.000,00
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan Bayarkan pajak dan perizinannya	Bapenda	9 unit	180.000.000,00	APBD KAB		9 unit	200.000.000,00
	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan Mesin lainnya yang dipelihara	Bapenda	5 unit	77.280.100,00	APBD KAB		5 unit	75.000.000,00
	3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Bapenda	1 unit	100.000.000,00	APBD KAB		1 unit	300.000.000,00
		Kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Pelayanan Adminitrasi Kepegawaian	Bapenda	-	-	APBD KAB		-	-

1	Bimbingan Teknis Implemnetasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	Bapenda	-	-	APBD KAB	-	-
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan pajak Daerah		15% 100% 15%			15% 100% 15%	15.434.901.075,00
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan Pajak daerah	Bapenda	100%	10.794.628.123,00	APBD KAB	100%	15.434.901.075,00
1.	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	2 dokumen	64.128.520,00	APBD KAB	2 dokumen	100.000.000,00
2.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis pajak Daerah serta Pengembangan pajak daerah dan kebijakan Daerah	Bapenda	2 dokumen	453.000.000,00	APBD KAB	2 dokumen	597.000.000,00
3.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	22 laporan	986.205.785,00	APBD KAB	22 laporan	1.200.000.000,00
4.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	2 unit	857.975.000,00	APBD KAB	2 unit	1.035.000.000,00
5.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Daerah, Subyek Pajak dan Wajib pajak daerah	Bapenda	2 laporan	1.612.024.787,00	APBD KAB	2 laporan	4.880.718.760,00
6.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan Hasil Pengelolaan ,Pemeliharaan dan Pelaporan basis data Pajak Daerah	Bapenda	10 laporan	665.107.000,00	APBD KAB	10 laporan	300.000.000,00
7.	Penilaian Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanahdan Bangunan (BPHTB)	Jumlah obyek Pajak yang disesuaikan NJOPNya	Bapenda	5 Obyek Pajak	569.440.000,00	APBD KAB	5 Obyek Pajak	586.550.000,00
8.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Bapenda	780.200 dokumen	165.235.000,00	APBD KAB	780.200 dokumen	196.235.000,00
9.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Junlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda	50 layanan	274.500.000,00	APBD KAB	50 layanan	274.500.000,00
10.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penilaian dan verifikasi	Bapenda	-	-	APBD KAB	-	-
11.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Hasil pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Bapenda	780.200 dokumen	4.623.114.704,00	APBD KAB	780.200 dokumen	4.684.000.000,00
12.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan pajak Daerah	Bapenda	-	-	APBD KAB	-	-
13.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan pajak Daerah	Bapenda	100 dokumen	279.150.600,00	APBD KAB	100 dokumen	559.711.800,00
14.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Retribusi daerah	Bapenda	4 laporan	244.746.727,00	APBD KAB	4 laporan	649.185.515,00

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 ini, bertujuan untuk mengevaluasi dan menentukan Langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Blitar dengan tetap tidak terlepas dari tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah ini juga memerlukan keterlibatan semua pihak, sehingga semua komponen dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar ikut terapresiasi dan terwakili, juga ikut bertanggung jawab terhadap program kerja yang direncanakan. dan hal-hal yang perlu digaris bawahi terkait pengoptimalan Penerimaan pendapatan antara lain:

1. Peningkatan pelayanan yang lebih efisien dengan dukungan aplikasi dan tenaga pelaksana yang terampil dibidangnya.
2. Perbaikan Data base Pajak yang lebih akurat akan berpengaruh pada penerimaan Pajak Daerah.
3. Kegiatan rekonsiliasi pajak dilaksanakan secara regular agar piutang pajak dapat dikurangi.
4. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk membayar pajak melalui edukasi, sosialisasi dan konsultasi.

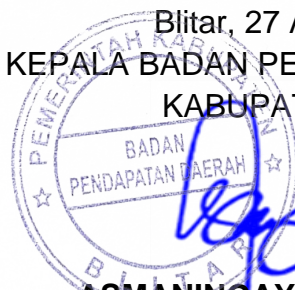
Optimalisasi dalam implementasi Perubahan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan Penerimaan Asli Daerah yang sudah menjadi tugas dan fungsi dari Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar.

Selain upaya pelaksanaan program dan kegiatan yang optimal dilaksanakan, juga dilaksanakan kegiatan rencana tindak lanjut penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menjadi hambatan kegiatan Badan Pendapatan Daerah kabupaten blitar, meliputi ;

1. Bekerjasama dengan instansi terkait (APH) dalam penyelesaian Piutang dari tahun ketahun yang semakin bertambah.
2. Melibatkan Pihak ketiga dan aparatur wilayah dalam hal penyelesaian masalah Basis data pajak yang belum akurat dan valid.
3. Pengembangan Teknologi digitalisasi dalam rangka mendukung Pendataan, Pelayanan, serta Penerimaan daerah agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
4. Mensinergikan program dan kegiatan untuk menciptakan kolaborasi dengan stakeholder terkait, guna mencapai tujuan peningkatan PAD.
5. Terus melakukan Sosialisasi dan Edukasi kepada masyarakat utamanya Wajib Pajak Kabupaten Blitar.

Semoga Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten blitar Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten blitar Tahun 2024. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Blitar, 27 Agustus 2024
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR



ASMANINGAYU DEWI L.,ST,MM

Pembina Tingkat I

Nip.19780426 200212 2 011